



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 12 September 2018

Jaksa Garap Bukti Korupsi Akreditasi Puskesmas Malteng

Masohi - Tim Kejari Maluku Tengah (Malteng) masih terus menggarap bukti-bukti dugaan korupsi di proyek akreditasi puskesmas tahun 2017 di Dinas Kesehatan kabupaten setempat.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, dugaan korupsi proyek senilai Rp 1,8 milyar itu kemungkinan naik ke tahap penyelidikan. Sebab, tim penyelidik menemukan ada indikasi perbuatan melawan hukum.

"Kajian sedang dilakukan. Kita menunggu hasilnya seperti apa. Namun dari keterangan dan data sementara yang berhasil dihimpun, sepertinya arah peningkatan ke tingkat penyelidikan bakal berjalan," kata sumber di Kejari Malteng.

Kasi Intel Kejari Malteng, Afrizal Tuasikal yang dikonfirmasi *Siwalima*, melalui telepon selulernya, Selasa (9/9) mengaku, hasil pengumpulan data dan keterangan masih dikaji.

"Kita masih melakukan kajian. Tentu hasilnya seperti apa akan kita infokan secepatnya. Soal apakah keterangan yang dihimpun itu telah memberikan gambaran kuat untuk dilakukan penyelidikan, itu belum kita simpulkan," kata Tuasikal.

Tuasikal mengatakan, dugaan ketidak beresan penggunaan dana akreditasi puskesmas tahun 2017 akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Tak Gentar

Seperti diberitakan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, Jenny Adijaya sama sekali tidak gentar dengan langkah kejaksaan setempat mengusut proyek akreditasi puskesmas tahun 2017 senilai Rp 1,8 milyar.

Adijaya mengklaim, pengelolaan dana akreditasi puskesmas Rp 1,8 milyar sudah dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

"Itu hak jaksa. Memang sudah merupakan tugas mereka. Yang pasti semua kegiatan akreditasi puskesmas sudah dilaksanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Penggunaan anggarannya pun telah digunakan sesuai aturan, sehingga bagi kami tidak ada masalah. Apalagi laporannya telah diaudit resmi oleh BPK," tandas Adijaya kepada *Siwalima*, di ruang kerjanya, Rabu (5/9).

Ia mengakui, dana akreditasi puskesmas tahun 2017 Rp 1,8 milyar. Tetapi dana itu tidak terpakai seluruhnya, sehingga dikembalikan karena tidak digunakan.

"Kalau diperhatikan dari nilai anggaran tersebut, pasti semua orang pasti akan setuju nilainya cukup besar. Namun penggunaannya pun sudah sangat maksimal sesuai dengan kebutuhan kegiatan akreditasi puskesmas, apalagi anggarannya tidak seluruhnya digunakan. Malah ada pula yang kita kembalikan," ungkap Adijaya.

Adijaya membenarkan, kalau akreditasi puskesmas ditangani hanya oleh tiga orang. Menurutnya, sesuai aturan mereka yang bisa melaksanakan akreditasi adalah mereka yang memiliki sertifikasi akreditasi.

"Kalau dari kita memang tiga orang ASN dan tiga lagi dari eksternal. Namun itu kehendak aturan, terutama juknis dan peraturan menteri. Mereka yang bisa mengelola hal ini hanya mereka yang telah memiliki sertifikasi akreditasi," jelasnya.

Adijaya mengungkapkan, dari dana Rp 1,8 milyar, yang tidak terserap hampir Rp 800 juta. Sebab, hanya tiga puskesmas yang dilibatkan dalam kegiatan akreditasi.

"Tidak semua anggaran 1.8 milyar rupiah itu terserap. Hampir mendekati 800 juta rupiah yang tidak digunakan. Sebab hanya tiga puskesmas saja yang dilibatkan dan dinilai untuk mencapai akreditasi. Jadi seluruh kegiatan anggaran digunakan untuk kepentingan akreditasi tiga puskesmas saja saat itu," urainya.

Sementara Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Maluku Tengah, N Manuhuttu yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan itu, juga mengatakan, dana yang digunakan sudah sesuai kebutuhan, diantaranya untuk kegiatan workshop sebanyak 3 kali.

"Banyak kegiatan yang di laksanakan saat itu, diantaranya workshop. Kalau penyerapan yang sangat besar itu adalah pembiayaan tim penilai yang ditunjuk dari depkes. Seluruh akomodasi mulai dari Jakarta PP, dan akomodasi selama



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

di Masohi serta honorinya pun dibiayai dengan anggaran itu. Belum lagi honor tim eksternal, pembiayaan peserta dan lain sebagainya. Selain itu banyak anggaran yang tidak terpakai kami pun mengembalikannya ke kas negara,” kata Manuhuttu.

Tetap Usut

Kejari Maluku Tengah tak berhenti. Pengusutan dana akreditasi puskesmas tahun 2017 senilai Rp 1,8 milyar tetap berjalan, kendati Kepala Dinas Kesehatan, Jenny Adiyaja mengklaim tidak ada masalah dalam pengelolaan dana itu.

“Kami kira wajar saja kadis menyatakan sikap seperti itu. Kita kan baru bekerja, hasilnya akan terus kita kaji. Prinsipnya pernyataan kadis itu tidak bisa menghentikan kerja kita untuk mengungkap ada atau tidak ketidakberesan anggaran akreditasi puskesmas Maluku Tengah tahun 2017,” tandas Kasi Intel Kejari Maluku Tengah, Afrizal Tuasikal kepada *Siwalima* di Masohi, Kamis (6/9).

Tuasikal mengatakan, tim masih terus bekerja untuk menghimpun data, dan keterangan awal soal kasus ini. Setelah itu, akan dikaji, apakah layak atau tidak ditingkatkan ke tahap penyelidikan.

“Kita kerja dulu, yang pasti kita tidak akan berhenti. Data data masih kita himpun, nanti setelah itu, akan kita kaji untuk di tingkatkan atau sebaliknya. Yang pasti pernyataan siapapun tidak bisa menghentikan kerja kita dalam menegakan hukum,” ujarnya. **(S-36)**